




Hotel Nakal Gunakan Sumur Dangkal

■ 200 Hotel Belum Daftar Pemanfaatan Air PDAM


Kuncinya adalah ketegasan dalam pengendalian, bagaimana pemerintah mampu melihat langsung fakta di lapangan dan menegakkan aturan, jangan lagi biarkan hotel menggunakan air tanah dangkal

YOGYA, TRIBUN - Air tanah di Kota Yogyakarta terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Beberapa gedung bertingkat seperti hotel ternyata masih enggan menggunakan air PDAM. DLH Kota Yogyakarta bahkan menyebut beberapa hotel nakal menggunakan sumur dangkal. Sebagian hotel itu meng-

gunakan air tanah yang menyedot jatah air untuk kebutuhan rumah tangga. Topik kasus perebutan air tanah antara hotel dengan masyarakat sekitar inilah yang kemudian juga menjadi sorotan Lembaga Ombudsman (LO) DIY.



● ke halaman 14

Hotel Nakal Gunakan Sumur

• Sambungan Hal 13

LOD pada Selasa (19/7) menggelar diskusi bertema "Menggali Kebijakan Terkait Pengendalian Air Tanah di Yogyakarta".

Di Kota Yogyakarta terdapat Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 3 tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan. Peraturan tersebut mewajibkan hotel menggunakan air baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Rupanya, banyak hotel yang enggan menggunakan PDAM dan tetap memilih air tanah.

Kepala Bagian Produksi PDAM Kota Yogyakarta Robid Lokanan mengatakan, dari sebanyak 340 hotel yang ada, baru 140 hotel yang mendaftarkan diri menggunakan air PDAM. Sisanya masih belum berniat menggunakan air PDAM.

Alasan kualitas

Ia menyebut, pengelola hotel beralasan kualitas dan kuantitas air PDAM tidak sesuai standar mereka sehingga enggan memakainya. Padahal, PDAM saat ini mengklaim bahwa debit air sudah mencukupi.

"Bilangnya kuantitas atau debit airnya kurang, pada

hal setelah kita cek (di lapangan), airnya mencukupi kok," ujar Robid pada Rabu (19/7).

Menurutnya, alasan hotel hanya melihat kondisi air 4-5 tahun lalu. Diakuinya, dulu kualitas dan kuantitas air memang belum terlalu baik, namun saat ini sudah baik dan cukup sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi hotel tidak memakai air PDAM.

"Empat tahun lalu mungkin iya, tapi kalau sekarang saya jamin tidak. Wong ternyata hotel-hotel itu gak punya saluran air untuk cek kualitas dan kuantitas air, bagaimana mereka bisa ngomong tidak layak," ungkapnya.

Ketua Bidang Sosialisasi, Kerjasama, dan Penguatan Jaringan LOD DIY Mohammad Imam Santoso mengungkapkan, efisiensi pembiayaan menjadi pertimbangan mengapa hotel masih enggan menggunakan air PDAM. Menggunakan air PDAM mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar ketimbang air tanah dangkal.

Dijelaskannya, sebagai ilustrasi di kota Yogyakarta, harga air baku untuk non-PDAM dihargai Rp600 per meter kubik. Angka tersebut sangat jauh bila hotel menggunakan air PDAM dihargai kisaran Rp5.500 per meter kubiknya dan naik

secara progresif.

"Kenapa banyak hotel enggan memakai PDAM, karena estimasi biayanya lebih murah pakai air tanah. Hitungan kasarnya, kalau pakai PDAM mengeluarkan Rp10 juta - Rp20 juta per bulan, sedang kalau pakai air tanah paling hanya bayar pajak kisaran Rp1 juta - Rp2 juta saja," jelasnya.

Tegakkan aturan

Karenanya, LO DIY sangat menekankan fungsi pengawasan dan pengendalian harus dioptimalkan. Imam menyebut, pemerintah harus menegakkan aturan sendiri yakni Perwal nomor 3 tahun 2014.

"Kuncinya adalah ketegasan dalam pengendalian, bagaimana pemerintah mampu melihat langsung fakta di lapangan dan menegakkan aturan, jangan lagi biarkan hotel menggunakan air tanah dangkal," ujarnya.

Imam merekomendasikan, pemerintah tidak boleh memberikan izin kepada pengusaha hotel atau apartemen untuk menggunakan air tanah selama PDAM mampu menyuplai bagi pengusaha. Hal itu agar mengurangi konflik dengan masyarakat.

Sulit diendus

Kasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Kota Yogyakarta Peter

Lawoasal menyebut, ada beberapa hotel yang nakal menggunakan sumur dangkal. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah karena akan menyedot air tanah warga sekitar.

"Itu sering ditemukan ketika kita turun ke lapangan, menemukan beberapa hotel masih menggunakannya. Dulunya mungkin dibuat semasa proses pembangunan tapi sampai hotel beroperasi, sumur dangkal masih digunakan," sebutnya.

Beberapa hotel juga beralasan tengah mengurus izin ke PDAM. Diakuinya, praktik tersebut sulit diendus karena hanya bisa dibuktikan bila petugas satpol PP melihat langsung ke hotel. "Sulitnya hotel-hotel itu banyak yang diam-diam membuat sumur dangkal, itu kan sulit kita cek karena hanya bisa dibuktikan dengan visual cek langsung saja," ungkap mantan Kepala Sub Bidang Pemulhan Lingkungan DLH tersebut.

Dijelaskannya, air tanah di Kota Yogyakarta bila musim hujan naik hingga 14 sentimeter. Namun saat musim kemarau tiba bisa susut hingga 12 sentimeter. Ia berharap pihak hotel tetap bertahan hanya menggunakan PDAM untuk menghindari konflik dengan masyarakat, karena perebutan air. (gil/ais)

Harus Ada Konservasi

DIREKTUR Eksekutif Walhi, Halik Sandera mengatakan pengambilan air sumur dalam untuk hotel dan apartemen akan berdampak terjadinya penurunan muka air tanah jangka panjang. Sementara, kebijakan penggunaan air PDAM juga sebenarnya memiliki dampak yang sama.

Hal ini karena sumber air baku PDAM sebagian besar dari air tanah atau sumur dalam. Sementara, dalam distribusinya jaringannya sama dengan jaringan untuk warga. Artinya suplai air warga pengguna PDAM juga akan terganggu.

● ke halaman 14

Harus Ada Konservasi

● Sambungan Hal 13

Hal yang paling tepat dalam mengendalikan penurunan muka air tanah, menurutnya, dengan kebijakan moratorium pembangunan skala besar seperti hotel, mall, apartemen. Pembangunan tersebut harus mendapat moratorium secara permanen. Sementara, pengawasan operasional hotel dan bangunan skala besar harus betul-betul dilakukan. Jika ada pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan.

Pakar Geologi dan Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta Dr Eko Teguh Paripurno mengatakan, pemberian izin penggunaan air tanah kadang tidak melihat adanya risiko. Ketika kajian-kajian menyebut, adanya risiko kekeringan atau penyedotan air tanah secara masif, pemerintah harus tegas pengusahan tak boleh pakai air tanah.

"Kalau seluruh wilayah kondisinya sama (kekeringan) maka tidak masalah, namun apabila terjadi anomali pengambilan air masif, ya ini masalah," ujar Eko.

Anomali

Eko menjelaskan, terjadi anomali di Kota Yogyakarta

yakni gedung-gedung besar, biasanya hotel, menyedot air tanah cukup dalam dengan volume cukup banyak. Resikonya, ini menghabiskan "jajah" air tanah bagi rumah tangga masyarakat.

Menurutnya, perebutan sumber daya air oleh penggunaan air skala besar dalam ruang yang sempit secara cepat menjadi ancaman baru bagi kelompok rentan, yakni warga. Kerentanan warga meningkat, seiring dengan keterbatasan kemampuan adaptasi, yakni warga kalah bersaing pada titik-titik perebutan sumber daya air.

"Bila ada jelas risiko seperti ini, ya sudah hotel-hotel harus pake PDAM. Langkah itu

untuk menghilangkan anomali tersebut," sebut Eko.

Bila seluruh hotel menggunakan air yang dikelola PDAM, maka konservasi air tanah akan lebih mudah. Artinya, langkah untuk memanen hujan menjadi lebih efektif, yakni dengan perhitungan pembelian air yang dilakukan oleh pengusaha hotel.

"Selama ini kan tidak ada harga konservasinya, siapa saja hanya mengambil air tok, tapi tidak pernah membayar biaya konservasi," ungkapnya. "Jangan hanya mengatur soal pengambilan air, pemerintah perlu menyusun aturan memanen air untuk konservasi, setelah mengambil air," jelasnya. (ais/gil)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PDAM Tirtamarta	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005